

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG VAKSINASI COVID-19 OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Rian Fujiono

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : fujiono.ryan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran belum berjalan optimal. Diantaranya sosialisasi kegiatan vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran hanya sampai ke tingkat pemerintah desa, padahal seharusnya sosialisasi dilakukan sampai kepada masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya manusia atau petugas vaksinator yang merupakan tenaga medis di Puskesmas sehingga saat pelaksanaan kegiatan vaksinasi petugas vaksinator mengalami kewalahan, serta sosialisasi tentang manfaat kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran masih minim, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai manfaat yang diperoleh dari kegiatan vaksinasi Covid-19 masih kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran mengenai sosialisasi mengenai kegiatan vaksinasi covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, informasi yang disampaikan oleh petugas mengenai manfaat kegiatan vaksinasi covid-19 cukup jelas dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat serta tidak ada penyimpangan informasi. Faktor penghambat diantaranya antusiasme dari masyarakat masih kurang dan tim yang bertugas tidak banyak. Upaya untuk mengatasi diantaranya melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan penyediaan tenaga vaksinator tambahan diluar tenaga vaksinator yang ada

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Vaksinasi, Covid-19*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk ±270.203.917 jiwa berdasarkan sensus tahun 2020, data terbaru menurut kementerian kesehatan pada 30 Mei tahun 2021 secara nasional jumlah yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sudah mencapai ±4.243.843 kasus dan jumlah yang meninggal dunia akibat terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sudah mencapai ±143.388 orang. Sedangkan, data di provinsi Jawa Barat jumlah yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sudah mencapai ±705.729 dan jumlah yang meninggal akibat terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mencapai ±14.695.

Kabupaten Pangandaran yang memiliki jumlah penduduk sekitar ±428.242 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2020, data terbaru pada 26 Agustus tahun 2021 jumlah terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pangandaran telah mencapai ±6.535 dan jumlah yang meninggal akibat terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mencapai ±192 orang. Sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pangandaran dengan angka yang telah terpapar virus *COVID-19* maka, persentasenya tergolong cukup banyak. Hal tersebut perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai penyebaran Virus *COVID-19*. Langkah yang diperlukan yaitu dengan dilakukannya program vaksinasi

COVID-19 yang merata di Kabupaten Pangandaran.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Virus *COVID-19*, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tercapainya kekebalan imunitas masyarakat kelompok (*herd immunity*), melindungi masyarakat dari *COVID-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terjangkit dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/menghilangkan) penyakit itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Pangandaran, terlihat bahwa implementasi kebijakan tentang vaksinasi *COVID-19* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Pangandaran hanya sampai ke tingkat pemerintah desa, masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 berdasarkan informasi yang diperoleh hanya pada saat kegiatan vaksinasi sehingga berakibat pada antusiasme masyarakat yang berkurang untuk ikutserta pada kegiatan vaksinasi Covid-19.

2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia atau petugas vaksinator yang merupakan tenaga medis di Puskesmas. Petugas vaksinator terdiri dari 7 orang yang bertugas menyuntikan vaksin kepada sekitar 40-70 orang perhari, namun dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran mereka dituntut dengan target sasaran lebih dari itu, sehingga saat pelaksanaan kegiatan vaksinasi petugas vaksinator mengalami kewalahan.
3. Sosialisasi tentang manfaat kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran masih minim, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai manfaat yang diperoleh dari kegiatan vaksinasi *COVID-19* masih kurang, sehingga masyarakat lebih terpengaruh oleh berita-berita negatif mengenai efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi *COVID-19*

Dari pemahaman dan permasalahan serta akibat yang dipaparkan di atas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran”**.

KAJIAN PUSTAKA

a. Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah di implementasikan.

Edward III (Syahrudin, 2017 : 27) menyatakan bahwa, ‘Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya.’ Apabila suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Menurut Hogwood dan Gunn (Syahrudin, 2017 : 27), 'Kegagalan kebijakan dapat dibagi kedalam pengertian yaitu: (*policy failure*) dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).' Kegagalan dari implementasi suatu kebijakan kebanyakan disebabkan oleh:

1. Pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*),
2. Kebijakannya sendiri yang memang jelek (*bad policy*), dan
3. Kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).

Grindle (Syahrudin, 2017 : 28), juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa, 'Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.' Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*A policy delivery system*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (Syahrudin, 2017 : 58) melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu '*communication, source, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.'

Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau aturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementer yang tepat.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan program. Sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan.

Struktur birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah

kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

c. Konsep Vaksinasi

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang dapat berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk digunakan, yang apabila diberikan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tujuan pemberian adanya vaksin yaitu memberikan kekebalan pada kalangan seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan maksud menurunkan kematian dan yang terjangkit virus atau penyakit tersebut.

Syarat-syarat penerima vaksinasi sesuai dengan yang tertuang dalam “Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 02.02/4/I/2021 mengenai Pengarah proses Implementasi Vaksinasi Pada Saat Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengenai ketentuan penerima Vaksin Covid 19”. Berikut sebagian ketentuan yang perlu dipenuhi yaitu:

a. Tidak mempunyai penyakit yang terdapat pada format screening /penapisan. Penyakit tersebut yaitu telah terpapar Covid 19 derita indikasi awal penyakit infeksi saluran pernapasan contohnya batuk, flu, asma pada kurun waktu 7 hari, saat dapat *treatment* aktif berpanjangan

dalam malfungsi darah, penyakit gagal jantung, ginjal kronis, penyakit hipertiroid dan penyakit kanker.

- b. Tidak sedang hamil atau sedang menyusui.
- c. Tidak terdapat komponen keluarga yang koneksi dalam treatment karena terpapar COVID-19.
- d. Temperatur atau suhu badan bagi penerima vaksinasi tidak boleh diatas 37.5°C.
- e. Tidak memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol.
- f. Tidak mengidap alergi berat terhadap vaksin *COVID-19*

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang.
2. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang.
4. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan

- Kabupaten Pangandaran
sebanyak 1 orang.
5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang.
 6. Kepala Sub. Bagian Pelaporan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang.
 7. Petugas Vaksinator sebanyak 3 orang
 8. Masyarakat sebanyak 6 orang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis data Kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covis-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehehatan dan masyarakat dengan mengacu pada dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, (Syahrudin, 2017 : 58-63) yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi).
2. *Source* (Sumber Daya).
3. *Disposition or Attitudes* (Disposisi / Sikap).
4. *Bureaucratic Structures* (Struktur Birokrasi).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 4 dimensi implementasi kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi diketahui belum optimal, hasil ditunjukan pada indikator sosialisai mengenai kegiatan Vaksinasi Covid 19 disampaikan secara langsung kepada masyarakat selaku target sasaran telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian indikator pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik atau permasalahan baru ditengah masyarakat

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 adalah sosialisasi kegiatan vaksinasi covid-19 telah dilakukan secara maksimal walaupun cakupannya masih belum menyeluruh dan antusiasme dari masyarakat yang masih kurang serta sebagian masyarakat belum begitu paham mengenai manfaat dari kegiatan vaksinasi covid-19, sehingga masih ada masyarakat yang terpengaruh berita-berita hoax mengenai efek samping yang ditimbulkan setelah di vaksin.

Menurut Widodo (Syahrudin, 2017: 125) mengemukakan bahwa:

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan

pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas diketahui bahwa sosialisasi mengenai kegiatan vaksinasi covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dapat diinterpretasikan bahwa disampaikan cukup baik karena disampaikan cukup jelas kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung maupun melalui media perantara lainnya walaupun cakupannya masih belum menyeluruh dan informasi yang disampaikan mengenai kegiatan vaksinasi covid-19 dapat dipahami oleh masyarakat serta tidak menimbulkan konflik atau permasalahan baru di tengah masyarakat telah berjalan cukup baik walaupun informasi yang disampaikan belum menyeluruh dan sebagian masyarakat belum begitu paham dan mengetahui mengenai manfaat dari kegiatan vaksinasi covid-19.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya diketahui belum optimal, hasil ditunjukkan pada indikator sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia atau petugas vaksinator, sumber daya finansial, maupun fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid 19

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 adalah pada awal

pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 petugas vaksinator yang bertugas tidaklah banyak sehingga mereka agak kewalahan dalam melayani masyarakat yang hendak vaksin.

Menurut Edward III dalam Syahrudin (2017:60-61) mengemukakan bahwa:

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu:

1. Staff atau pegawai
2. Informasi
3. Wewenang
4. Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas di ketahui bahwa sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia atau petugas vaksinator, sumber daya finansial, maupun fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid 19, diawal pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 petugas vaksinator sedikit kewalahan dalam melayani masyarakat yang hendak vaksin. Untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya cukup baik.

c. Disposisi / Sikap

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi disposisi diketahui bahwa adanya ketersediaan dari petugas vaksinator selaku pelaksana dari kebijakan Vaksinasi Covid 19 dalam menyikapi program tersebut dengan antusias. Setiap petugas vaksinator pun

selalu menempatkan kebijakan tersebut sebagai prioritas program karena program tersebut telah menjadi suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan Covid-19 yang tengah terjadi.

Sebagaimana dikemukakan Syahrudin (2017:62) bahwa:

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas di ketahui bahwa ketersediaan dari petugas vaksinator dan dukungan dari pimpinan kepada pejabat pelaksana selaku pelaksana kebijakan Vaksinasi Covid 19 sudah cukup baik dan menempatkan kebijakan tersebut sebagai prioritas program karena program sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi disposisi diketahui bahwa struktur birokrasi yang ada telah tertata dengan baik dan kerja sama antara masing-masing bidang yang terkait telah berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi

Covid 19 dapat berjalan efektif dan efisien.

Menurut Edward III (Syahrudin, 2017:63) mengemukakan bahwa:

Stuktur birokrasi merupakan kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya Kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas diketahui bahwa struktur birokrasi yang ada telah tertata dengan baik dan berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 dapat berjalan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran maka disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui belum optimal, hal itu dilihat dari beberapa dimensi yang masih belum berjalan dengan baik, terutama pada dimensi Komunikasi dan Sumber Daya yang masih belum berjalan optimal

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah sosialisasi kegiatan yang dilakukan masih dalam masa pandemi yang melarang masyarakat untuk berkumpul atau berkerumun sehingga antusiasme dari masyarakat masih kurang serta masih adanya pemikiran-pemikiran masyarakat yang terpengaruh berita hoax yang beredar mengenai efek samping yang ditimbulkan setelah divaksin dan terkait ketersediaan sumber daya manusia bahwa tim yang bertugas tidak banyak sehingga pelaksanaan kegiatan vaksin tersendat yang mengakibatkan masyarakat menunggu terlalu lama.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah dengan adanya sosialisasi mengenai kegiatan vaksinasi Covid -19 melalui media-media sosial, berkeliling daerah secara angung mengajak masyarakat untuk vaksin serta menghimbau dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tidak terpengaruh hoax yang beredar mengenai efek samping yang ditimbulkan setelah divaksin, penambahan tenaga vaksinator serta menghimbau kepada masyarakat yang hendak vaksin agar datang secara bergantian sehingga saat pelaksanaan

kegiatan vaksin tidak menunggu terlalu lama dan menimbulkan kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Syahrudin. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Eko Agustinova, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.

Aries Siswanto, Victorianus. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Hiplunudin, Agus. 2017. *Kebijakan, dan Pelayanan Publik; Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Calpulis.

Dokumen:

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19.)

Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 02.02/4/I/2021 mengenai

Pengaruh proses Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Vaksinasi Pada Saat Kesehatan Kabupaten
Penanggulangan Pandemi Pangandaran Tahun 2021-2026
COVID-19 mengenai ketentuan
penerima Vaksin Covid 19.